

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN JAYAPURA

Marthin Adelberth Sesa

NPP. 32.1065

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.1065@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Papua Province is still one of the regions in Indonesia that faces serious poverty challenges. Geographical conditions that are difficult to reach, inadequate infrastructure, and limited access to basic services are the main factors in the high poverty rate, especially among Indigenous Papuans (OAP) in Jayapura Regency. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the Special Autonomy policy in an effort to reduce the poverty rate of Indigenous Papuans in Jayapura Regency. **Method:** This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because the qualitative model is able to describe the topic in detail and in depth so that the problem can be analyzed better. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation techniques and data triangulation. The main theory used to analyze this topic is policy implementation from Van Meter and Van Horn. There were 13 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** This research produces several findings analyzed according to the dimensions, in the dimension of standards and policy objectives there are clear standards and goals that are also directed, in the dimension of policy resources it is still inadequate because many infrastructure and facilities are not optimal, in the dimension of Communication and inter-organizational strengthening activities there is already quite good communication in terms of capacity building, in the dimension of the characteristics of implementing agents is still not optimal in terms of experience in solving poverty problems, in the dimension of Attitudes and Tendencies Implementers have shown a good attitude between governments, in the dimension of Social, Economic and Political Environment is still not conducive given the high level of vulnerability of conditions in Jayapura. **Conclusion:** In general, the implementation of this policy has not been fully optimized because there are still gaps between planning and implementation in the field, as well as the uneven understanding of stakeholders of the substance of the special Autonomy policy.

Keywords: *Special Autonomy, Poverty, Indigenous Papuans*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan yang serius. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan, khususnya di kalangan Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Kabupaten Jayapura. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi angka

kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif mampu mendeskripsikan topik dengan rinci dan mendalam sehingga masalah dapat dianalisis dengan lebih baik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dilakukan triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dianalisis menurut dimensi, pada dimensi standar dan tujuan kebijakan sudah terdapat standar yang jelas serta tujuan yang juga terarah, pada dimensi sumber daya kebijakan masih belum memadai karena banyak infrastruktur dan sarana yang belum optimal, pada dimensi Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi sudah terdapat komunikasi yang cukup baik dalam segi *capacity building*, pada dimensi karakteristik agen pelaksana masih belum optimal dilihat dari segi pengalaman dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pada dimensi Sikap dan Kecenderungan Pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik antar pemerintah, pada dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik masih belum kondusif mengingat tingginya tingkat kerawanan kondisi di Jayapura. **Kesimpulan:** Secara umum pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta belum meratanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kebijakan Otonomi khusus.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Kemiskinan, Orang Asli Papua

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Yang menjadi hal utama dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah harmonisasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Lambelanova, 2022). Kebijakan otonomi khusus di Papua yang tercantum didalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Sutiyo et al., 2024). Otonomi Khusus juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan hak yang lebih daripada besar ke Papua daripada daerah otonom lainnya, dengan memberikan hak dan kewenangan seluas-luasnya bagi provinsi Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan secara khusus serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Papua (Nurfurqon, 2020).

Provinsi Papua merupakan provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat ini terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (Tanzi, 2020). Sehubungan dengan

itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mengalami permasalahan kemiskinan yang cukup serius (Thahir, 2018). Kondisi geografis Papua yang sulit terjangkau, dengan wilayah yang luas dan topografi berbukit-bukit, menjadi tantangan utama dalam pembangunan dan pemerataan akses ke layanan dasar serta pusat-pusat perekonomian (Saputra, 2019). Selain itu, infrastruktur yang masih terbatas, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, juga turut menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang/jasa di wilayah ini. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Papua adalah kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan (Smith, 2020). Hal ini berdampak pada produktivitas ekonomi yang terbatas. Terdapat juga isu-isu keamanan seperti separatisme dan konflik sosial yang terjadi di Papua juga turut menghambat upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Papua melalui berbagai program pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu, namun tantangan geografis, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang ada masih menjadi kendala yang perlu diatasi secara komprehensif.

Kemiskinan di Papua merupakan permasalahan yang menjadi turun temurun dan menjadi permasalahan yang kompleks yang akarnya tertanam dalam Sejarah kolonialisme, konflik berkepanjangan, serta kurangnya implementasi terhadap kemiskinan orang asli Papua. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Schmidt, 2023). Untuk memberikan gambaran terkait kondisi kemiskinan di Provinsi Papua, berikut penjelasan tentang angka kemiskinan berdasarkan kabupaten sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)
1	Kota Jayapura	12,82 %
2	Jayapura	11,62 %
3	Numfor	3,95 %
4	Sarmi	7,90 %
5	Keerom	6,88 %
6	Waropen	3,63 %
7	Mamberamo Raya	5,21 %
8	Supiori	3,08 %

Sumber : BPS, diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan data BPS tahun 2024 pada tabel di atas tingkat kemiskinan di Papua masih jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi geografis yang menantang dengan wilayah yang luas dan terisolasi, serta infrastruktur yang terbatas, semakin memperparah situasi.

Kabupaten Jayapura merupakan rumah bagi beragam suku bangsa asli Papua yang telah mendiami wilayah ini sejak zaman dahulu. Keberagaman suku di Kabupaten Jayapura tercermin dalam kekayaan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Beberapa suku asli

Mamberamo Tabi terlebih khusus di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain suku Sentani, Demta, Kaureh, Kemtuk, dan Nimbora. Setiap suku memiliki wilayah adat yang dikenal sebagai kampung yang menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Bagian dari rendahnya akses masyarakat tercermin dari layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan Listrik. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak merata dan tidak berkelanjutan telah menciptakan ketimpangan yang signifikan antara kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat adat dan pendatang. Meningkatnya angka kemiskinan juga terjadi di salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura. Data tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antar distrik. Beberapa wilayah, seperti Kemtuk dan Demta, memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan distrik lainnya, seperti Jayapura Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lokal yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap distrik.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura masih menjadi tantangan yang serius. Meskipun terdapat beberapa distrik yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun secara umum, persentase penduduk miskin di wilayah ini masih tergolong tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap infrastruktur dasar, kualitas pendidikan, peluang kerja, serta kondisi geografis dan sosial budaya. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura, pemerintah Kabupaten Jayapura. Beberapa Program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Padat Karya, Program Pelatihan, Pemberian Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pemberian beasiswa program ini telah dijalankan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura, tetapi pada pelaksanaan program terdapat penghambat yakni akses penghubung, keterbatasan mengakses informasi mengenai otsus, dan yang menyebabkan program tersebut tidak dapat sampai pada masyarakat terlebih khusus Orang Asli Papua (Chauvel, 2019).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Otonomi Khusus telah memberikan kewenangan dan sumber daya finansial yang signifikan kepada Pemerintah Daerah Papua, masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana dana Otsus dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan, apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai, serta sejauh mana program-program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan. Analisis mendalam terhadap pola pengeluaran, transparansi anggaran, dan dampak langsung terhadap indikator kesejahteraan Orang Asli Papua dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas implementasi kebijakan Otsus dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Seringkali, program pengentasan kemiskinan dirancang dengan pendekatan top-down yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat (Turoldo, 2010). Penelitian dapat menggali sejauh mana kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dalam kerangka Otsus di Kabupaten Jayapura telah mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Orang Asli Papua. Ini termasuk analisis tentang bagaimana program-program tersebut mempertimbangkan sistem kepemilikan tanah adat, praktik ekonomi tradisional, dan struktur sosial masyarakat Papua. Eksplorasi terhadap potensi konflik antara modernisasi ekonomi dan pelestarian budaya, serta identifikasi strategi yang dapat menjembatani keduanya, dapat memberikan perspektif baru dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat lokal.

Otonomi Khusus Papua mengakui keberadaan lembaga adat sebagai bagian integral

dari struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana lembaga adat dapat berperan efektif dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Penelitian dapat menganalisis kapasitas lembaga adat dalam mengelola dan mengawasi program-program pengentasan kemiskinan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penguatan peran mereka. Ini termasuk eksplorasi tentang bagaimana lembaga adat dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian program, serta peran mereka dalam memastikan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi Orang Asli Papua. Analisis komparatif antara daerah yang melibatkan lembaga adat secara aktif dengan yang tidak, dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas pendekatan berbasis adat dalam pengentasan kemiskinan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik namun masih memiliki celah penelitian, Adapun seperti penelitian karya Tundiles Kogoya tahun 2023 berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dengan hasil Program pelayanan kesehatan bagi Orang miskin dengan cara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat distrik nunggawi untuk mendukung program pelayanan ini yang telah berjalan meskipun masih mandek-mandek. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu kemampuan dari Pemerintah distrik dan pemerintah desa harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan (Kogoya, 2023).

Penelitian kedua karya Senas Alken Demtu tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) DAK bidang Pendidikan di kabupaten Jayapura dengan hasil Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Jayapura belum berjalan dengan baik (Demtu, 2021).

Penelitian ketiga karya Edyanto tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dengan hasil menunjukkan bahwa ada empat faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur organisasi (Edyanto et al., 2021).

Penelitian keempat karya Munanda Munanda, Alfi Rahman tahun 2023 berjudul Implementasi Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Aceh Utara, dengan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) berperan penting dalam meringankan beban masyarakat miskin, namun masih terdapat sejumlah tantangan (Munanda et al., 2023).

Penelitian kelima karya Suharyo tahun 2016 berjudul Otonomi Khusus Di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat dengan hasil bahwa peraturan otonomi khusus yang dapat dikatakan sebagai produk hukum responsive dalam implementasinya masih menemukan banyak sekali kendala sehingga hasilnya tidak maksimal (Suharyo, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dengan menghadirkan analisis mendalam dan holistik terhadap implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam konteks pengentasan kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura, menggunakan pendekatan kualitatif yang kaya akan nuansa lokal. Studi ini tidak hanya mengeksplorasi efektivitas kebijakan dari perspektif administratif, tetapi juga menggali dimensi sosio-kultural yang seringkali terabaikan dalam studi kebijakan publik konvensional. Dengan mengintegrasikan wawasan dari para pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh adat,

pejabat pemerintah, dan masyarakat asli Papua, penelitian ini menyoroti kompleksitas interaksi antara kebijakan modern dengan sistem nilai tradisional dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis kebijakan dengan etnografi, mengungkap bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat lokal membentuk dan dipengaruhi oleh implementasi Otonomi Khusus. Lebih jauh, studi ini mengembangkan kerangka analisis baru yang mempertimbangkan indikator kesejahteraan yang lebih kontekstual dengan budaya Papua, melampaui ukuran kemiskinan konvensional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur tentang kebijakan otonomi daerah dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang pembangunan yang berkeadilan dan berbasis budaya di wilayah dengan karakteristik unik seperti Papua. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas melihat penanganan kemiskinan dari segi otonomi khusus secara umum tanpa melihat faktor orang asli papua seperti pada penelitian (Vitara Agatha & Uliansyah, 2021)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif dalam hal analisis pada implementasi kebijakan penurunan kemiskinan di Kabupaten Jayapura. Pendekatan ini dipilih dengan alasan fleksibilitas dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ketika pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara kepada informan tertentu yang dipilih oleh penulis. Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada subjek yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura, Adapun informan yang dipakai sejumlah 13 informan. Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, informan kunci adalah informan yang menurut spekulasi penulis memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik yang diangkat dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi, angka, gambar, dan diagram, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini dilakukan selama satu bulan kotor di bulan Januari 2025, Adapun lokus penelitian ini adalah di lingkup Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis pada pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura dengan pisau analisis teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn melalui beberapa dimensi seperti Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya kebijakan, Komunikasi dan aktivitas penguatan antar- organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap dan Kecenderungan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Dimensi ini merujuk pada kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan serta standar operasional yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Semakin jelas dan terukur tujuan kebijakan, maka semakin besar besar kemungkinan implementasinya akan berjalan baik. Ketidakjelasan dalam standar dan tujuan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Dinas Sosial Kabupaten Jayapura memiliki standar dan tujuan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan anak jalanan. Fakta ini dikuatkan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura bahwa “Sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, saya ingin menekankan bahwa kejelasan ukuran kebijakan dalam implementasi otonomi khusus sangat penting bagi kami. Kami telah menetapkan indikator yang jelas, seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses layanan dasar, namun kami menyadari bahwa pemahaman di antara semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan agar ukuran-ukuran ini dapat diukur secara efektif”. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa meskipun kejelasan ukuran kebijakan, ketersediaan standar, dan tujuan pelaksanaan otonomi khusus telah ditetapkan, masih ada tantangan dalam pemahaman dan penerapan di lapangan. Upaya untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sangat penting untuk memastikan dukungan dan keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Selama penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pemahaman terhadap tujuan program otonomi khusus di kalangan pelaksana teknis (seperti petugas lapangan) masih beragam. Beberapa petugas hanya memahami program secara administratif tanpa memahami indikator hasil seperti "penurunan kemiskinan Orang Asli Papua". Di beberapa distrik, papan informasi program belum mencantumkan indikator keberhasilan secara jelas. Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa indikator keberhasilan program mencakup Penurunan angka kemiskinan OAP sebesar 2% per tahun dan Peningkatan akses layanan dasar (kesehatan dan pendidikan) untuk OAP. Namun, laporan BPS tahun 2023 menunjukkan angka kemiskinan OAP masih stagnan di angka 27,3%, menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi.

3.2 Sumber Daya Kebijakan

Dimensi ini mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia seperti jumlah dan kompetensi pelaksana, sumber daya keuangan, serta dukungan informasi dan infrastruktur lainnya. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan maksimal, meskipun perencanaan telah dibuat dengan baik. Dari sisi sumber daya, peningkatan alokasi Dana Otsus menunjukkan adanya komitmen pemerintah. Dana untuk sektor pendidikan meningkat dari Rp13,5 miliar pada 2015 menjadi Rp19,9 miliar pada 2024. Namun Peningkatan ini belum diiringi dengan capaian pengurangan kemiskinan yang signifikan. Dinas Sosial Kabupaten Jayapura berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan dua dimensi kunci: Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Finansial. SDM yang kompeten dan terlatih menjadi aset utama dalam merancang dan melaksanakan program-program sosial yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Adapun menurut Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa “Kami terus berupaya mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kami memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan kami. Dengan mengintegrasikan SDM yang handal dan dukungan finansial yang kuat, kami yakin dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura”. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Sumber Daya Finansial yang memadai. SDM yang terlatih dan kompeten memungkinkan kami memberikan layanan yang efektif, sementara dukungan finansial yang cukup memastikan pelaksanaan program-program sosial yang berdampak.

Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura secara signifikan. Terdapat ketimpangan jumlah petugas sosial di distrik-distrik terpencil. Di Distrik Yokari misalnya, hanya terdapat dua orang petugas sosial yang menangani lebih dari 500 rumah tangga miskin. Fasilitas transportasi untuk menjangkau kampung-kampung terpencil juga sangat terbatas, terutama saat musim hujan.

Menurut Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, dari total 32 distrik, hanya 60% distrik yang memiliki tenaga sosial tetap. Anggaran program otonomi khusus di bidang sosial mengalami penurunan dari Rp 13 miliar (2022) menjadi Rp 10,5 miliar (2023) karena refocusing anggaran pasca pandemi.

3.3 Komunikasi dan Aktivitas Penguatan Antar- Organisasi

Dimensi ini merujuk pada komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak-pihak terkait lainnya merupakan syarat penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi harus mencakup isi kebijakan, prosedur, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Konsistensi komunikasi antara instansi terkait menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan langkah-langkah yang diambil. Dinas Sosial berkomitmen untuk menjaga saluran komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, sehingga masukan dan informasi dapat disampaikan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, menyatakan bahwa “Dinas Sosial berusaha menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan pemangku kepentingan memahami tujuan dan langkah-langkah yang diambil. Selain itu, hubungan kerja dan pola interaksi antar instansi sangat krusial, di mana forum koordinasi telah dibentuk untuk melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan”. Kesimpulan dari wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait sangat penting dalam implementasi kebijakan otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial berkomitmen untuk menjaga saluran komunikasi yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah, guna memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan langkah-langkah yang diambil.

Berdasarkan notulen rapat Forum Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (FKPPK) Kabupaten Jayapura, disebutkan bahwa integrasi program antar-OPD masih menjadi tantangan akibat lemahnya sistem monitoring lintas sektor. Laporan evaluasi dari Bappeda tahun 2023 juga menyoroti minimnya pelaporan kegiatan secara terpadu.

3.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi ini merujuk pada struktur organisasi, budaya kerja, serta kapasitas teknis dan manajerial dari instansi yang bertugas melaksanakan kebijakan. Agen pelaksana yang profesional, berpengalaman, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan akan berpengaruh positif terhadap implementasi. Dinas Sosial Kabupaten Jayapura memiliki agen pelaksana yang berkualitas, dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam menangani berbagai program sosial. Menurut pernyataan dari Kepala Bidang Bina Pembinaan Sosial, bahwa “Kami memastikan bahwa setiap pegawai dan relawan memiliki latar belakang yang sesuai dan dilatih secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal juga menjadi fokus utama kami. Kami menyadari bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang fleksibel dan responsif sangat diperlukan”. Kesimpulan dari wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Sosial menegaskan bahwa kualifikasi dan pengalaman agen pelaksana merupakan faktor krusial dalam keberhasilan program-program

sosial. Dinas Sosial berkomitmen untuk memastikan bahwa pegawai dan relawan memiliki kompetensi yang memadai melalui pelatihan yang rutin. Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal juga menjadi prioritas, mengingat setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang unik.

Menurut data dari BKD Kabupaten Jayapura tahun 2024, hanya 35% pegawai Dinas Sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kesejahteraan sosial. Pelatihan peningkatan kapasitas terakhir dilakukan pada tahun 2021, sehingga ada kesenjangan keterampilan teknis di kalangan pelaksana.

3.5 Sikap dan Kecenderungan Pelaksana

Dimensi ini merujuk pada sikap pelaksana terhadap kebijakan akan sangat menentukan efektifitas pelaksanaannya. Jika pelaksana mendukung dan merasa memiliki kebijakan tersebut, maka implementasi akan berjalan baik, sebaliknya, jika pelaksana bersikap pasif, apatis, atau bahkan menolak, maka hambatan implementasi akan meningkat. Dinas Sosial Kabupaten Jayapura sangat mengutamakan keterlibatan pelaksana dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana, yang terdiri dari pegawai dan relawan, dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, menyatakan bahwa “keterlibatan pelaksana dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan sangat diutamakan, karena mereka yang berada di lapangan memiliki wawasan berharga tentang kebutuhan masyarakat. Dukungan dari pelaksana dianggap krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga Dinas Sosial selalu berusaha mendengarkan masukan mereka dan melakukan dialog terbuka jika terdapat resistensi”. Kesimpulan dari wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa keterlibatan pelaksana dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan merupakan prioritas utama untuk memastikan relevansi dan efektivitas program-program sosial. Dukungan pelaksana sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dan Dinas Sosial berkomitmen untuk mendengarkan masukan serta melakukan dialog terbuka untuk mengatasi resistensi yang mungkin muncul. Namun, beberapa pegawai kontrak merasa program terlalu banyak beban administratif dibandingkan intervensi langsung ke masyarakat.

Berdasarkan Survei internal Dinas Sosial tahun 2024 mencatat bahwa 76% pelaksana merasa "cukup puas" terhadap arah kebijakan otonomi khusus. Namun, 62% responden menyatakan perlunya peningkatan pelibatan mereka dalam penyusunan program di tingkat distrik.

3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dimensi ini merujuk pada lingkungan eksternal tempat kebijakan diimplementasikan juga memainkan peran penting. Stabilitas politik, budaya lokal, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat akan memengaruhi penerimaan dan keberhasilan kebijakan. Dinas Sosial Kabupaten Jayapura beroperasi dalam konteks yang dipengaruhi oleh stabilitas politik di daerah otonomi khusus, yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan program-program sosial. Dinas Sosial berusaha memahami nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan diinternalisasi oleh warga. Faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan dan lapangan kerja, juga sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dinas Sosial berkomitmen untuk merancang program yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan sosial, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Sosial

Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa stabilitas politik di daerah otonomi khusus sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan sosial, karena situasi politik yang stabil memungkinkan perumusan dan implementasi program yang lebih efektif serta dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, beliau menekankan pentingnya kondisi sosial dan budaya masyarakat dalam penerimaan kebijakan, di mana pemahaman terhadap nilai-nilai lokal membantu merancang kebijakan yang relevan dan mudah diterima. Kesimpulan dari wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa stabilitas politik, kondisi sosial dan budaya, serta faktor ekonomi adalah elemen kunci yang mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan sosial. Dinas Sosial berkomitmen untuk merumuskan program yang efektif dan relevan dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Di beberapa distrik, seperti Kemtuk dan Kaureh, masih ditemukan pandangan skeptis dari masyarakat OAP terhadap program pemerintah akibat pengalaman masa lalu yang tidak transparan. Namun di wilayah seperti Sentani dan Waibu, respons masyarakat terhadap program sangat positif karena mereka merasakan dampaknya langsung.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jayapura 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antara OAP dan non-OAP masih tinggi, dengan Gini Ratio mencapai 0,46. Laporan dari Litbang Papua juga menyatakan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh pendekatan kultural dan keterlibatan tokoh adat dalam implementasi program.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini dilihat pada aspek yang berdampak langsung terkait dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Jayapura belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua (OAP). Data dari BPS Kabupaten Jayapura tahun 2024 menunjukkan ketimpangan ekonomi yang masih signifikan antara OAP dan non-OAP, dengan Gini Ratio mencapai 0,46, mengindikasikan disparitas pendapatan yang cukup tinggi. Hal ini merefleksikan tantangan besar dalam pemerataan manfaat Otonomi Khusus. Lebih lanjut, laporan dari Litbang Papua menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh pendekatan kultural dan keterlibatan tokoh adat dalam implementasi program. Penelitian ini menemukan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang mengadopsi pendekatan top-down tanpa mempertimbangkan aspek kearifan lokal cenderung kurang efektif. Sebaliknya, inisiatif yang melibatkan tokoh adat dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat menunjukkan tingkat penerimaan dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Temuan ini menyoroti pentingnya reformulasi strategi implementasi Otonomi Khusus yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks sosio-kultural OAP, termasuk pengembangan indikator kesejahteraan yang lebih sesuai dengan pandangan hidup masyarakat lokal. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya yang hanya melihat tingkat kemiskinan Masyarakat Papua secara umum dan tidak dipilah antara OAP maupun non-OAP (Fardan, 2019)

Selanjutnya Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya kendala signifikan dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus untuk mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, terungkap bahwa dari total 32 distrik yang ada, hanya 60% distrik yang memiliki tenaga sosial tetap. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan sosial di tingkat grassroot, yang berpotensi menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya penurunan anggaran program Otonomi Khusus di bidang sosial dari Rp 13 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 10,5 miliar di tahun 2023, yang disebabkan oleh refocusing anggaran pasca pandemi. Pengurangan anggaran ini berdampak signifikan pada cakupan dan intensitas program-program sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Temuan ini menggarisbawahi tantangan ganda yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus: keterbatasan sumber daya

manusia di lapangan dan konstrain anggaran. Situasi ini berpotensi memperlambat upaya pengentasan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi yang ada. Penelitian ini menyoroti urgensi untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap alokasi sumber daya, baik manusia maupun finansial, serta mengembangkan strategi inovatif untuk mengoptimalkan dampak program Otonomi Khusus dalam konteks keterbatasan yang ada, guna mencapai tujuan pengurangan angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura secara lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiratna & Qibthiyah, 2020)

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara target yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Aksi Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024 dengan realisasi di lapangan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua (OAP). Dokumen tersebut menetapkan target ambisius berupa penurunan angka kemiskinan OAP sebesar 2% per tahun dan peningkatan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, realitas yang tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan hasil yang jauh dari harapan, dengan angka kemiskinan OAP yang masih stagnan di level 27,3%. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus belum mampu memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan OAP di Kabupaten Jayapura. Temuan ini menyoroti adanya tantangan kompleks dalam mentransformasi kebijakan menjadi aksi nyata yang efektif di lapangan. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan eksekusi program, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta dinamika sosial-ekonomi lokal yang mungkin belum sepenuhnya diperhitungkan dalam perumusan kebijakan, berpotensi menjadi penyebab utama dari kesenjangan ini. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi implementasi kebijakan Otonomi Khusus, dengan fokus khusus pada identifikasi bottleneck yang menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta pengembangan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan konteks lokal OAP di Kabupaten Jayapura. Hasil ini berbeda dengan implementasi kebijakan di daerah Sorong (Alam & Ichwan, 2023)

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman di antara pemangku kepentingan, kemudian keterbatasan sumber daya finansial, adanya tantangan stabilitas politik dan sosial, dan juga resistensi dari pelaksana.

IV. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta belum meratanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kebijakan Otonomi khusus.

Keterbatasan Penelitian. Hasil yang tidak sempurna ini berawal dari beberapa keterbatasan dalam penelitian seperti singkatnya waktu penelitian yang tidak lebih dari satu bulan sehingga pengambilan data tidak dapat dilakukan dengan maksimal, hal ini juga berkaitan dengan minimnya instrument penelitian yang mana pada penelitian ini penulis bertindak sebagai instrument Tunggal penelitian, selain itu berkenaan juga dengan luasnya wilayah Kabupaten Jayapura sehingga beberapa kelompok Masyarakat tidak dapat diamati langsung oleh penulis yang mengakibatkan tidak diperolehnya data factual, terakhir berkenaan dengan anggaran penelitian yang minim.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian ini masih terfokus pada satu dinas yang berperan dalam pengentasan kemiskinan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Sehingga pada penelitian

yang akan datang diharapkan mampu menganalisis secara mendalam tentang jaringan multi aktor dalam penyelesaian masalah kemiskinan di Provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyampaikan apresiasi mendalam atas terselesaikannya penelitian ini. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi signifikan dalam proses penelitian dan pengembangan diri penulis. Pertama-tama, kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan tanpa batas dan pendidikan yang tak ternilai. Selanjutnya, kepada jajaran pimpinan IPDN dan seluruh staf pengajar atas transmisi pengetahuan dan wawasan yang berharga. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Baharuddin Thahir atas bimbingan yang penuh dedikasi, kebijaksanaan, dan inspirasi selama proses penelitian. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam pembentukan karakter dan perkembangan intelektual penulis. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas dan perkembangan ilmu pengetahuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. N. A., & Ichwan, S. (2023). Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus Di Kabupaten Sorong. *Faksi*, 9(3), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jf.v9i3.3184>
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 494. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Chauvel, R. (2019). Governance and the Cycle of Violence in Papua: The Nduga Crisis. *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 17(2).
- Demtu, S. A. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Eprints.Ipdn*, 21, 1–11. [http://eprints.ipdn.ac.id/11337/1/Ringkasan Skripsi Senas Alken Demtu.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/11337/1/Ringkasan_Skripsi_Senas_Alken_Demtu.pdf)
- Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>
- Fardan, M. F. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendidikan, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Periode Tahun 2011-2017). *Academia Edu*, 2(7), 1–23. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96178899/MUHAMMAD_FEISAL_FARDA N-FEB-libre.pdf](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96178899/MUHAMMAD_FEISAL_FARDA_N-FEB-libre.pdf)
- Kogoya, T., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *Journal Governance*, 3(1), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/45923>
- Lambelanova, R. (2022). Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Buku Literatur IPDN Tahun 2022*, 5(3), 248–253. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf>
- Munanda, Rahman, Alfi, dan Alqarni, Wais. (2023). Implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan pada masa pandemi covid-19 di Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(2), 1–13. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip%0AIMPLEMENTASI>

- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Saputra, R. (2019). Implementasi Pandu Gempita dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Konstituen*, 1(1), 23–44. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/23-42>
- Schmidtz, D. (2023). Poverty. *Social Philosophy and Policy*, 40(1), 1–8. <https://doi.org/10.1017/S0265052523000341>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Smith, D. J. (2020). Introduction to the Special Issue on National Cultural Autonomy in Diverse Political Communities: Practices, Challenges, and Perspectives. *Nationalities Papers*, 48(2), 224–234. <https://doi.org/10.1017/nps.2019.94>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1), 324. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.148>
- Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi Adat Dan Pemerintahan Di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 91–99. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064>
- Tanzi, A. M. (2020). On judicial autonomy and the autonomy of the parties in international adjudication, with special regard to investment arbitration and ICSID annulment proceedings. *Leiden Journal of International Law*, 33(1), 57–75. <https://doi.org/10.1017/S0922156519000554>
- Thahir, B. (2018). Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 103–114. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100>
- Turolfo, F. (2010). Relational autonomy and multiculturalism. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 19(4), 542–549. <https://doi.org/10.1017/S0963180110000496>
- Agatha, S. V., & Uliansyah, B. a. A. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *Jurnalku*, 1(3), 156–176. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.30>